

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai Komunikasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Diponegoro : Studi pada Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian komunikasi kebijakan Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro menunjukkan variasi pada setiap aspek, yaitu :
  - Aspek **transmisi** menjadi yang **paling lemah** melalui jangkauan penyebaran pesan Satgas PPK-PT, hal ini terlihat pada temuan bahwa 75% informan belum mengetahui keberadaan Satgas PPK-PT sebelum wawancara dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa eksposur informasi masih terbatas pada kalangan mahasiswa. Meskipun terdapat hambatan tersebut, sarana dan prasarana komunikasi Satgas PPK-PT dinilai sudah memadai dan terus berkembang.
  - Aspek **kejelasan** menjadi yang **paling kuat** karena pesan kebijakan disampaikan melalui pedoman yang jelas seperti Permendikbud-Ristek, Peraturan Rektor, SOP, dan Pakta Integritas sehingga proses penanganan kasus berjalan secara terstruktur, selain itu melalui akun Instagram resmi Satgas PPK-PT kejelasan informasi sudah dinilai jelas oleh Sebagian informan tetapi eksposur informasi tersebut dinilai belum menjangkau banyak mahasiswa.

- Aspek **konsistensi** tergolong **relatif baik** karena substansi pesan yang disampaikan tetap stabil dan dijaga melalui mekanisme internal seperti penggunaan panduan materi sosialisasi dan proses persetujuan publikasi sebelum konten disebar. Melalui Instagram Satgas PPK-PT ditemukan bahwa substansi pesan yang disampaikan tetap sama dengan variasi penyampaian pesan yang berbeda untuk menarik audiens. Namun melalui data primer, konsistensi Satgas dinilai kurang optimal akibat dominasi informasi hanya pada saat kasus viral.
2. Berdasarkan analisis faktor pendukung dan penghambat komunikasi kebijakan Satgas PPK-PT UNDIP pada tiga aspek utama, dapat disimpulkan bahwa aspek transmisi memiliki faktor pendukung paling banyak, seperti adanya perluasan kanal komunikasi, peningkatan intensitas sosialisasi langsung, serta dukungan kelembagaan dari UPT LKPD-DEM, tetapi aspek transmisi juga memiliki faktor penghambat yang dominan, meliputi jangkauan informasi yang belum merata, ketergantungan pada algoritma media digital, keberagaman preferensi platform sasaran kebijakan, keterbatasan finansial untuk website, dan minimnya *repost* konten oleh media resmi universitas. Aspek kejelasan didukung oleh standar regulasi (Permendikbud-Ristek, Peraturan Rektor, SOP, dan Pakta Integritas), dokumentasi transparan melalui *dashboard monitoring*, serta pelatihan internal, dengan hambatan utama berupa rendahnya pengetahuan mahasiswa akibat keterbatasan jangkauan. Sementara itu, aspek konsistensi diperkuat oleh standarisasi materi publikasi dan pelatihan regulasi,

meskipun aspek ini masih terhambat oleh rendahnya visibilitas di kalangan sivitas akademika. Secara keseluruhan, tantangan utama terletak pada pemerataan eksposur agar komunikasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan masalah yang ditemukan melalui penelitian ini, beberapa mahasiswa dan peneliti dapat memberikan saran untuk mengoptimalkan Komunikasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Diponegoro agar menjangkau seluruh sivitas akademika, yaitu:

1. Dalam Temuan Komunikasi kebijakan, aspek transmisi masih sangat terbatas sehingga Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro disarankan untuk mengoptimalkan strategi transmisi informasi melalui diversifikasi kanal komunikasi yang disesuaikan dengan preferensi dan karakteristik kelompok sasaran, misalnya dengan memanfaatkan portal akademik universitas, website resmi universitas, newsletter kampus, informasi kebijakan juga dapat disampaikan melalui kegiatan akademik seperti penyampaian singkat di dalam kelas oleh dosen, forum rapat fakultas, maupun kegiatan orientasi mahasiswa agar informasi dapat tersebar secara lebih merata kepada seluruh sivitas akademika. Penguatan kolaborasi dengan unit resmi universitas, fakultas, serta organisasi kemahasiswaan juga dapat dipertimbangkan agar memfasilitasi redistribusi informasi secara lebih luas melalui mekanisme *repost* Instagram, portal akademik, dan kegiatan *daily* di kampus. Selain itu, peningkatan intensitas sosialisasi

langsung kepada dosen dan tenaga kependidikan dapat dijadikan pendekatan pelengkap untuk mengatasi *under accommodation*. Upaya tersebut diharapkan agar mampu meningkatkan keterpaparan informasi secara merata di kalangan komunitas kampus.

2. Berdasarkan faktor penghambat yang ditemukan, Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro dapat melakukan kolaborasi dengan pihak lembaga yang lebih besar, seperti universitas agar distribusi informasi kebijakan dapat terhubung dengan kanal komunikasi resmi kampus, seperti website universitas, portal akademik, redistribusi komunikasi melalui akun media sosial resmi universitas dan fakultas. Selain itu, penjadwalan publikasi konten di media sosial Satgas dapat dipertimbangkan dengan terstruktur, karena unggahan yang terjadwal dapat membantu meningkatkan *engagement* konten oleh algoritma platform sosial media sehingga jangkauan informasi menjadi lebih luas, selain itu penguatan *engagement* melalui struktur internal Satgas PPK-PT dapat dipertimbangkan agar pengelolaan publikasi dan komunikasi kebijakan dapat menjadi prioritas yang dikelola secara lebih terencana. Pihak lembaga universitas juga diharapkan dapat memberikan dukungan melalui alokasi biaya yang memadai untuk kegiatan sosialisasi dan produksi konten edukatif atau untuk mengoptimalkan website.